



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BAMBANG PAMUJI**
2. Jabatan : **SEKRETARIS**
3. NHK : **69151**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 3.548.550.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m²/160 m² di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 174.324.200
2. Tanah Seluas 4000 m² di MAGELANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 557.865.000
3. Tanah Seluas 2790 m² di MAGELANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 389.110.800
4. Tanah dan Bangunan Seluas 2880 m²/500 m² di MAGELANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 485.100.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 12 m²/12 m² di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 72.675.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m²/45 m² di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
7. Tanah Seluas 900 m² di SLEMAN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 378.000.000
8. Tanah Seluas 1399 m² di SLEMAN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 734.475.000
9. Tanah Seluas 302 m² di SLEMAN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 134.400.000
10. Tanah Seluas 520 m² di SLEMAN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 222.600.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 305.569.800



1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA 2.0 V M/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 231.876.000
2. MOTOR, KAWASAKI NINJA BR 250 E Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 28.693.800
3. MOTOR, VESPA 150 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	153.840.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	819.583.899
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	4.827.543.699
III. HUTANG	Rp.	120.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.707.543.699

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.